

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PENGELOLA DANA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Syaripudin Hasan¹, Florence O. Moroki², Andrew P. Marunduh³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Indonesia
Email : syaripudinhasan027@gmail.com, florencemoroki@unima.ac.id, andrewmarunduh@unima.ac.id

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, serta perwakilan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sebagian besar variasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan sistem pengendalian internal merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.

Kata Kunci : Kompetensi, Partisipasi, Pengendalian Internal, Akuntabilitas

ABSTRACT : This study aims to analyze the effect of the competence of village fund management officials, community participation, and the internal control system on the accountability of village fund allocation (ADD) management in Luksagu Village, Tinangkung Utara District, Banggai Kepulauan Regency. This study employed a quantitative approach with a total of 40 respondents. The sampling technique used was purposive sampling by selecting respondents who were considered to understand and be directly involved in village fund management, including the Village Head, Village Secretary, Heads of Affairs, Hamlet Heads, and representatives of community leaders. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed using multiple linear regression with SPSS software. The results indicate that partially, the competence of officials, community participation, and internal control systems each have a positive and significant effect on the accountability of Village Fund Allocation management. Simultaneously, these three variables also have a positive and significant effect on the accountability of Village Fund Allocation management. The findings further show that most of the variation in the accountability of Village Fund Allocation management can be explained by these three variables, while the remaining variation is influenced by other factors outside the scope of this study. The findings highlight that improving official competence, enhancing community participation, and strengthening the internal control system are key factors in achieving accountable and transparent village fund management.

Keywords : Competence, Community, Internal Control, Accountability

PENDAHULUAN

Kedudukan desa dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan komunitas hukum yang memiliki batas wilayah, otoritas pemerintahan, hak tradisi, serta kepentingan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa. Sebagai organisasi pemerintahan terdepan, desa membutuhkan dukungan pendanaan untuk

menjalankan program pembangunan. Untuk itu, pemerintah menyalurkan dana desa setiap tahun kepada 74.954 desa di seluruh Indonesia dalam jumlah yang cukup besar (Kemenkopmk, 2023). Untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang baik, Pemerintah Indonesia telah memperbarui regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 yang mengatur pengelolaan umum dana desa, mencakup penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Selain itu, PMK Nomor 146 Tahun 2023 mengatur rincian alokasi dana desa Tahun Anggaran 2024, termasuk kriteria penambahan dan aturan spesifik penyalurannya. Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian tentang tata kelola dana desa yang dilakukan Mumu et al. (2023) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa, BPD, lembaga permusyawaratan masyarakat dan tokoh agama semuanya berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), sehingga memungkinkan anggaran dana desa dapat disusun sesuai dengan prioritas. Artinya, Musrenbang Desa melibatkan berbagai unsur desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Manihuruk & Sumual (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terwujud apabila pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan dan pembangunan desa.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Luksagu Tahun Anggaran 2019 - 2024

Tahun	Anggaran Dana Desa
2019	Rp 827.678.000
2020	Rp 826.609.000
2021	Rp 817.728.000
2022	Rp 978.169.000
2023	Rp 790.945.000
2024	Rp 796.456.000

Sumber : Data Kantor Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa Luksagu secara konsisten menerima alokasi dana desa setiap tahun anggaran 2019–2024. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai besarnya dana publik yang dikelola oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Di Desa Luksagu, persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan kompetensi aparatur desa yang ditandai dengan masih terbatasnya pemahaman teknis pengelolaan keuangan, di mana sebagian besar aparatur berpendidikan setingkat SMA dan masih memerlukan peningkatan kemampuan teknis, sehingga memengaruhi proses penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Persoalan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil keterkaitan antara kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal (Sarah et al., 2020). Penelitian Fatimah (2023) menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh. Selain itu, Pahlawan et al. (2020) juga menemukan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu belum sepenuhnya menunjukkan temuan yang konsisten. Adnyana (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif, sedangkan kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Adhivinna & Damayanti (2022) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, Indraswari & Rahayu (2021) justru menemukan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan, sementara pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tersebut serta kondisi empiris yang ditemukan di Desa Luksagu, hingga saat ini belum terdapat kesimpulan empiris yang konsisten mengenai pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya pada desa dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses geografis dan tantangan administratif tersendiri. Penelitian ini merujuk pada penelitian Fatimah (2023) sebagai salah satu landasan empiris, namun disesuaikan dengan perbedaan ruang lingkup variabel, yaitu tanpa memasukkan pemanfaatan teknologi informasi, serta perbedaan objek dan karakteristik wilayah penelitian, yakni Desa Luksagu yang merupakan wilayah kepulauan.

KAJIAN TEORI

Teori Stewardship menjelaskan bahwa individu atau aparatur dalam organisasi berperan sebagai pengelola (steward) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya demi kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi. Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa teori ini menekankan orientasi tanggung jawab dan kepercayaan terhadap aparatur sebagai pihak yang memiliki moralitas tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintah desa, stewardship theory menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai pengelola dana publik memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melaksanakan tugas secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat (Santoso et al., 2022). Teori Stewardship menjadi landasan teoritis utama dalam penelitian ini karena secara konseptual mampu menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat serta pihak terkait lainnya berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa (Indriasih & Sulistyowati, 2022). Pengelolaan dana desa mencakup tahapan perencanaan, proses, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Santoso et al. (2022) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek akuntabilitas.

Menurut Pahlawan et al. (2020), kompetensi aparatur desa adalah kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa yang menjadi tolak ukur dalam mengelola dana desa secara baik dan akuntabel. Aparatur desa diharapkan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, mengikuti pelatihan secara berkelanjutan, serta memahami pengelolaan keuangan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan optimal. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa, maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga akan semakin meningkat. Aparatur desa dengan tingkat kompetensi yang baik akan lebih mampu mengelola dana desa secara optimal. Tingkat kompetensi tersebut umumnya dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur desa (Pahlawan et al., 2020).

Setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan pemerintah desa (Savitri et al., 2022). Menurut Sarah et al. (2020), partisipasi diartikan juga bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legetimasi yang mewakili kepentingan. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan program pembangunan serta dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan peluang yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Pemerintah tidak akan mampu mencapai tujuan pembangunan tanpa adanya keterlibatan masyarakat secara langsung, demikian pula masyarakat tidak akan mencapai kesejahteraan tanpa adanya peran pemerintah, sehingga pemerintah dan masyarakat harus saling melengkapi dalam upaya membangun desa (Rondonuwu et al., 2020). Hipotesis dalam riset ini ialah:

- H₁** : *Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa nvironmental performance mempengaruhi dengan signifikan environmental disclosure.*
- H₂** : *Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.*
- H₃** : *Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa..*
- H₄** : *Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kuantitatif, yakni penelitian ilmiah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengujian hipotesisnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta unsur masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 120 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Purposive Sampling Teknik*. Responden dalam penelitian ini meliputi aparatur pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, Kepala Dusun), anggota lembaga kemasyarakatan desa serta perwakilan tokoh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian, jumlah responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 Orang (n = 40). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran angket kepada responden sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis data yang didukung oleh pengamatan variable dependen dan independen ini menggunakan model analisis regresi data panel untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan system pengendalian internal berpenaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dalokasi dana desa.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KAP	40	30	50	42,2	4,317
PM	40	32	50	44,1	3,985
SPI	40	28	48	41,0	4,205
APDD	40	31	50	43,3	3,872
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Olah Data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil tabel di atas, variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 42,2 dengan standar deviasi 4,317. Nilai minimum sebesar 30 dan maksimum 50 menunjukkan adanya variasi skor antarresponden, namun penyebaran data relatif kecil. Dari hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa ada 43 butir pertanyaan yang diberikan kepada 40 responden, dan dapat diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki nilai validitas > 0,3040 (dibulatkan 0,30) atau dengan kata lain r hitung lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

Dari hasil Uji Reliabilitas untuk variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.933 > 0.6, Partisipasi Masyarakat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.887 > 0.6, Sistem Pengendalian Internal diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.916 > 0.6, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.844 > 0.6, dengan demikian reliabilitas bisa diterima. Artinya Instrumen atau angket dalam penelitian ini dapat dipercaya.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.39783734
	Absolute	.212
Most Extreme Differences	Positive	.212
	Negative	-.158
Kolmogorov-Smirnov Z		1.341
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olah Data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov–Smirnov pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,055. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	.158	6.325
X2	.408	2.448
X3	.221	4.532

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Hasil uji multikolinearitas pada tabel coefficients di atas diperoleh nilai VIF X1 = 6,325, VIF X2 = 2,448, dan VIF X3 = 4,532, yang seluruhnya lebih kecil dari 10. Nilai Tolerance ketiga variabel juga berada di atas batas 0,10. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.815	2.785		2.088	.044
1 Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa	.524	.248	.447	2.109	.042
Partisipasi Masyarakat	.972	.097	.972	10.044	.000
Sistem Pengendalian Internal	.412	.219	.384	2.879	.048

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang hasilnya dapat dilihat pada tabel coefficients di atas, maka model atau persamaan regresi dalam penelitian ini diketahui adalah:

$$Y = 5.815 + 0,524X_1 + 0,972X_2 + 0,412X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa : Konstanta sebesar 5,815, koefisien regresi Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa sebesar 0,524, Koefisien Partisipasi Masyarakat sebesar 0,972, Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,412.

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.815	2.785		2.088	.044
1 Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa	.524	.248	.447	2.109	.042
Partisipasi Masyarakat	.972	.097	.972	10.044	.000
Sistem Pengendalian Internal	.412	.219	.384	2.879	.048

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1441.925	3	480.642	71.745	.000 ^b
Residual	241.175	36	6.699		
Total	1683.100	39			

Hasil uji simultan atau uji F yang ditunjukkan pada tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 71,745 lebih besar dari F tabel 2,866 ($71,745 > 2,866$). Nilai F tabel diperoleh melalui distribusi F dengan ketentuan $df_1 =$ jumlah variabel independen ($k = 3$) dan $df_2 = n - k - 1$ ($40 - 3 - 1 = 36$). Dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh F tabel sebesar 2,866, Selain itu, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang juga lebih kecil dari 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.857	.845	2.588

Berdasarkan nilai Adjusted R Square pada tabel Model Summary sebesar 0,845, hal ini menunjukkan bahwa 84,5% variasi perubahan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal, sedangkan sisanya yaitu 15,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

1) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X_1) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Temuan ini konsisten dengan prinsip Stewardship Theory, yang menekankan bahwa aparatur yang kompeten cenderung memiliki motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab moral dalam menjalankan mandat publik. Aparatur yang memahami tugasnya akan bertindak selaras dengan tujuan organisasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatimah (2023) dan Santoso et al. (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Indraswari & Rahayu (2021) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Perbedaan ini diduga berkaitan dengan kapasitas aparatur di lokasi penelitian mereka yang belum memadai.

2) Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_2) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Partisipasi Masyarakat (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Temuan penelitian ini sejalan dengan perspektif Stewardship Theory, di mana partisipasi masyarakat berperan membangun hubungan kepercayaan antara principal (masyarakat) dan steward (aparatur). Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi et al. (2021) dan Sahrul et al. (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat transparansi dan meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam mengelola dana publik. Namun, berbeda dengan penelitian Indriaswari & Rahayu (2021) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Hal ini dimungkinkan karena dalam penelitian tersebut tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, dan proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh perangkat desa.

3) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X_3) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Sistem Pengendalian Internal (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Hasil ini sejalan dengan penelitian Santoso et al. (2022) dan Adnyana (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mekanisme pengawasan yang baik membuat aparatur desa lebih berhati-hati dan transparan dalam setiap kegiatan pengelolaan dana publik. Namun, hasil ini berbeda dengan

penelitian Suhaedi et al. (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan internal di daerah penelitian mereka.

4) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Sistem Pengendalian Internal (X3) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Dengan demikian, hipotesis simultan (H4) dapat diterima. Secara keseluruhan, Temuan penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada pengawasan eksternal, tetapi lebih pada rasa tanggung jawab moral, kepercayaan, dan integritas aparatur desa. Dengan demikian, penelitian ini mendukung asumsi utama Stewardship Theory yang menekankan bahwa perilaku aparatur publik dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat apabila didukung oleh nilai-nilai etika dan tata kelola yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan terbukti dan dapat diterima kebenarannya. dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran yang perlu diperhatikan agar bermanfaat sebagai bahan pertimbangan yakni untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dan menambahkan variabel lain yang relevan agar hasil penelitian lebih komprehensif. Kemudian Pemerintah Desa Luksagu disarankan untuk meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat sistem pengendalian internal melalui pengawasan rutin dan penerapan prosedur kerja yang konsisten. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan sesuai kebutuhan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan dasar pembinaan terhadap desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga implementasi strategi pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., & Damayanti, N. (2022). Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 134–143. <https://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/2087>
- Aditya, W., & Widaryanti, W. (2022). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 43–48. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.444>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3), 1–21. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2829/2839>
- Bawinto, E., Tanor, L. A. O., & Marunduh, A. P. (2024). Pengaruh pendapatan desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa (Studi kasus pada Kecamatan Tombulu Kabupaten

- Minahasa tahun 2019–2023). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi (JEKMA)*, 2(3), 9–18. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/118>
- Budiman, N. V., Karamoy, H., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis sistem pengendalian internal atas penjualan kredit pada Pt. Rajawali Nusindo Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 366–375. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29674.2020>
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh kepemimpinan kepala desa, kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(6), 2312–2320. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1096>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–17. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1764>
- Kekemko PMK. (2023). Penguatan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa. <https://kemenkopmk.go.id/penguatan-pemerintahan-untuk-meningkatkan-kualitas-pembangunan-desa>
- Manihuruk, R. W., & Sumual, T. E. M. (2023). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi (JEKMA)*, 1(1), 33–44. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/8>
- Mumu, O., Pangkey, R., & Tangkau, J. (2023). Pengaruh peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi (JEKMA)*, 1(4), 78–87. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/56>
- Mumu, M. C., Manaroinsong, J., & Evinita, L. L. (2023). Tata kelola dana desa pada Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi (JEKMA)*, 1(4), 70–77. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/55>
<https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.24>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2024*.
- Rindorindo, S., Tanor, L. A., & Pangkey, R. I. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 71–76. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/660>
- Rondonuwu, R., Sumual, T. E., & Kewo, C. L. (2020). Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan dana desa pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3) 56–65. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/611>
<https://doi.org/10.33592/jeb.v27i1.1226>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: